

**RESPON MASYARAKAT DI DESA HANURA LAMPUNG DALAM
PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH
(Studi Sosiologi Pembangunan Keuangan Masyarakat Desa)**

(SKRIPSI)

Oleh

REZHA MARSYA NABILA

2216011020



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**RESPON MASYARAKAT DI DESA HANURA LAMPUNG DALAM
PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH
(Studi Sosiologi Pembangunan Keuangan Masyarakat Desa)**

Oleh:

REZHA MARSYA NABILA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERITAS LAMPUNG**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

RESPON MASYARAKAT DI DESA HANURA LAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH (Studi Sosiologi Pembangunan Keuangan Masyarakat Desa)

Oleh

REZHA MARSYA NABILA

Salah satu upaya pembangunan ekonomi desa adalah pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai lembaga ekonomi kolektif. Namun, kehadiran koperasi sebagai struktur sosial baru memunculkan beragam respon di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon masyarakat Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih dengan menggunakan perspektif teori Robert K. Merton. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya respon masyarakat yang beragam, mulai dari antusias dan mendukung hingga ragu dan skeptis. Perbedaan respon dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, tingkat pemahaman, dan kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif Merton, koperasi memiliki fungsi manifes sebagai sarana peningkatan ekonomi desa, sekaligus fungsi laten dan potensi disfungsi. Penelitian ini menegaskan bahwa koperasi berpotensi memberdayakan ekonomi desa apabila dikelola secara transparan dan partisipatif.

Kata kunci: respon masyarakat, Koperasi Merah Putih, pembangunan desa.

ABSTRACT

COMMUNITY RESPONSES to THE ESTABLISHMENT of The MERAH PUTIH COOPERATIVE in HANURA VILLAGE LAMPUNG (A Sociological Study of Village Community Financial Development)

By

REZHA MARSYA NABILA

One effort to promote the rural economy is the establishment of the Koperasi Merah Putih as a collective economic institution. However, as a new social structure, the cooperative has generated diverse community responses. This study analyzes community responses in Hanura Village, Teluk Pandan Sub-district, Pesawaran Regency, Lampung, to the establishment of the Koperasi Merah Putih using Robert K. Merton's theoretical perspective. This research employs a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation and analyzed descriptively. The findings indicate varied community responses, ranging from supportive to skeptical attitudes. These differences are influenced by past experiences, levels of understanding, and public trust. From a Mertonian perspective, the cooperative serves a manifest economic function while also generating latent functions and potential dysfunctions. The study concludes that the cooperative can empower the rural economy if managed transparently and participatively.

Keywords: community response, Koperasi Merah Putih, rural development.

Judul Skripsi : **RESPON MASYARAKAT DI DESA HANURA
LAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN
KOPERASI MERAH PUTIH (Studi Sosiologi
Pembangunan Keuangan Masyarakat Desa)**

Nama Mahasiswa : **Rezha Marsya Nabila**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216011020**

Program Studi : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Sosiologi

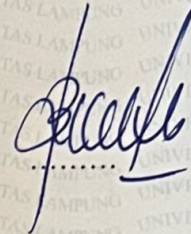
[Signature]

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si
NIP. 19770401200501200

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si.**



Penguji : **Damar Wibisono, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Januari 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 20 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Rezha Marsya Nabila

NPM. 2216011020

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rezha Marsya Nabila, lahir di Desa Tirta Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada 01 Mei 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Jauhari dan Ibu Resti Yana, S.Pd.I., serta kakak dari Khesya Azzahra Pratiwi dan Raja Jaya Pranata. Penulis berkewarganegaraan Indonesia, berasal dari suku Lampung, dan beragama Islam. Pendidikan formal penulis dimulai pada jenjang pendidikan anak usia dini di TK Al Furqon, yang diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 02 Panaragan dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 02 TBT dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMAS Al-Kautsar Bandar Lampung, dan berhasil diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan nonakademik.

Penulis terlibat aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi sebagai anggota Divisi Kajian Intelektual, yang berfokus pada pengembangan keilmuan, diskusi akademik, serta kajian sosial kemasyarakatan. Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan organisasi dan minat bakat di bidang olahraga, yaitu Bulu Tangkis dan Taekwondo, sebagai bentuk pengembangan diri di luar bidang akademik. Dalam rangka memperluas wawasan dan pengalaman praktis, penulis pernah melaksanakan kegiatan magang di Badan Strategi

Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2025. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perumusan dan analisis kebijakan publik di tingkat nasional. Selain kegiatan akademik dan magang, penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Bumi Nabung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, pada tahun 2025. Melalui kegiatan ini, penulis berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan serta berkontribusi langsung dalam kehidupan sosial masyarakat.

MOTTO

“ Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

(Penulis)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Al Baqarah 286)

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Q.S Al-Insyirah:5)

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia"

(Baskara Putra - Hindia)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kemudahan, dan ridha-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang, karya ini penulis persembahkan kepada:

**Kedua Orang Tuaku Tercinta Bapak Jauhari Hop dan Ibu Resti Yana,
S.Pd.I.**

Terima kasih atas kasih sayang, doa, kesabaran, serta dukungan yang senantiasa menyertai setiap perjalanan penulis. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa pengorbanan dan ketulusan kalian.

Adik- adikku Tersayang Khesya Azzahra Pratiwi dan Raja Jaya Pranata

terima kasih selalu menjadi adik yang baik dan menyenangkan. Semoga kelak engkau dapat menapaki jalan terbaik dan meraih cita-cita yang diimpikan.

Kepada Semua yang Telah Memberikan Dukungan Kepada Penulis

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah atas rahmat dan hidayahnya. Tiada daya dan upaya serta kekuatan yang penulis miliki untuk menyelesaikan skripsi ini, selain berkat daya, upaya dan kekuatan yang dianugerahkan-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nanti hingga hari akhir kelak. Skripsi dengan judul **“Respon Masyarakat di Desa Hanura Lampung dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih (Studi Sosiologi Pembangunan Keuangan Masyarakat Desa)”** ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari, bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga menjadi baik. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari banyak sekali bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, ridho, dan kekuatan. Berkat rahmat-Nya, penulis diberikan kesehatan, ilmu, dan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan karya sederhana ini sebaik mungkin;
2. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta. Abi dan Umi, terimakasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta kasih, arahan, dukungan dan apapun yang telah diberikan. Abiw dan Umic adalah hal paling berharga yang penulis miliki. Terimakasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi. Teruntuk laki-laki hebat sekaligus panutan ku dalam menjalani hidup ini, terimakasih atas segala usaha, keringat dan selalu

menjadi tempat diskusi terbaik ketika penulis kesusahan dalam membaca peta kehidupan. Teruntuk wanita mulia ku, terimakasih atas doa mu yang selalu engkau panjatkan, sehingga selama proses hidup ini berlangsung penulis selalu diiringi hal-hal baik. MasyaAllah, banyak orang diluar sana yang begitu bangga atas diriku, dan sering kali menjadikan role model terlebih didalam keluarga besar, namun ketahuilah bukan aku yang hebat, melainkan didikan dan doa Abi dan Umi yang mampu membentuk diri ini menjadi sebaik-baiknya manusia. Kebanggaan tiada tara karna menjadi anak pertama yang dididik dan tumbuh beriringan dengan Abi dan Umi. Terimakasih untuk semua hal apapun itu Umi, Abi I love u

3. Teruntuk adik perempuanku tercinta Khesya Azzahra Pratiwi dan adik priaku Raja Jaya Pranata, terimakasih atas segala cinta kasih, dukungan dan doa-doa baik yang selalu dipanjatkan. Walaupun terkadang kamu mengesalkan namun, I Love u so much uti, bung.
4. Teruntuk Hop Family dan Syahri Family, terkhusus kepada Kakek dan Nenek yang senantiasa melangitkan doa-doa baik, memberikan dukungan dan cinta kasihnya selama ini. Sungguh luar biasa nikmat menjadi cucu perempuan dari dua belah keluarga ini, dan terimakasih untuk kesempatan berharga yang tidak akan penulis dapatkan dari pengalaman manapun.
5. Ibu Prof. Dr. Anna Gestiana Zainal, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku ketua Jurusan Sosiologi sekaligus dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingan dan segala ilmu yang sudah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang memuaskan;
7. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku dosen penguji yang sudah bersedia memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, atas bimbingan dan juga ilmu yang bermanfaat sebagai

bekal bagi penulis

10. Seluruh staff Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas kesabaran, bantuan, dan arahan yang diberikan kepada penulis selama masa kuliah berlangsung
11. Untuk sahabat-sahabat terbaik penulis, Aliya Zalfa Putri, Arnia Dwi Antika, dan Yanche Adellia. Perjalanan panjang dalam menyelesaikan skripsi ini tidak pernah penulis lalui sendiri. Di setiap fase kehidupan, saat lelah, ragu, dan hampir menyerah, kalian selalu hadir sebagai penguat. Dalam kebahagiaan, kalian berbagi tawa dalam kesedihan, kalian menjadi tempat penulis berteduh
12. Untuk sahabat SMA penulis, Hanifah Zakiyah, Aurel Tasya Syabilla Putri, dan Farhan Arigo Syam. Proses panjang penyusunan skripsi ini menjadi lebih bermakna karena kehadiran kalian. Di tengah berbagai tekanan, keraguan, dan kelelahan, kalian hadir bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai pengingat bahwa penulis tidak berjalan sendirian
13. Untuk Agustin Anggraisa, sahabat seperjuangan penulis selama masa perkuliahan sekaligus teman yang telah menjadi saudara. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tak pernah putus dalam setiap proses yang dijalani. Berbagai diskusi, canda, serta saling menguatkan di tengah lelahnya perkuliahan menjadi penguat langkah penulis untuk bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini hingga tahap akhir
14. Untuk teman-teman magang penulis, Raisa, Pida, Zahra, Kartika, dan Razik, selama menjalani program magang di BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga selama satu semester
15. Untuk teman-teman penulis yang senantiasa hadir menemani penulis, pagi, siang, hingga malam, terutama dalam fase kehidupan setelah penulis mengalami life after breakup. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan kesediaan untuk mendengarkan tanpa menghakimi.
16. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan penulis tidak bisa sebutkan namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat penyusunan tugas akhir ini memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti arti pengalaman, pendewasaan, sabar dan arti kehilangan

sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini

17. Terakhir, untuk diri penulis sendiri. Terima kasih karena tetap bertahan ketika hidup terasa paling berat dan arah sering kali tidak jelas, karena memilih untuk tidak berhenti meskipun ada hari-hari di mana bangun saja terasa menjadi perjuangan. Dalam diam, penulis telah melalui banyak hal yang tidak selalu mampu dijelaskan, namun tetap berusaha menjalani setiap proses dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas keberanian menghadapi kegagalan, kehilangan, dan kekecewaan tanpa benar-benar menyerah pada keadaan, karena setiap air mata, keraguan, dan kelelahan yang pernah hadir bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses pendewasaan yang membentuk keteguhan hati.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun agar lebih baik. Penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumber informasi literatur untuk penulisan karya ilmiah berikutnya.

Bandar Lampung, 14 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Koperasi Merah Putih	7
1. Pengertian Koperasi Merah Putih.....	7
2.1.2 Pembangunan Masyarakat Desa	10
1. Pengertian Pembangunan Desa	10
2.1.3 Koperasi Merah Putih dan Pembangunan Desa	13
2.2 Landasan Teori.....	16
2.2.1 Teori Respon Sosial Robert K. Merton.....	16
2.3 Penelitian Terdahulu	17
2.4 Kerangka Berfikir.....	26
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Metode Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Informan Penelitian.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5.1 Wawancara Mendalam.....	33
3.5.2 Observasi.....	35

3.5.3 Dokumentasi	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
IV. GAMBARAN UMUM.....	39
4.1 Gambaran Umum Desa Hanura	39
4.1.1 Letak Geografis Desa Hanura	39
4.1.2 Kondisi Demografi.....	40
4.1.3 Kondisi Pekerjaan	40
4.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi Desa Hanura	41
4.1.5 BUMDes Hati Nurani	42
4.1.5.1 Profil BUMDES Hati Nurani	42
4.1.5.2 Peranan Dana Desa dan Pengembangan Ekonomi BUMDes Hanura	44
4.2 Sejarah Koperasi Indonesia.....	45
4.3 Sejarah Koperasi di Desa Hanura	47
4.3.1 Revolusi Pola Utang Masyarakat Desa Hanura dari Rentenir hingga Pinjaman Online	49
4.3.2 Pemikiran Mohammad Hatta tentang Koperasi dalam Konteks Praktik Utang.....	51
4.3.4 Koperasi Merah Putih sebagai Upaya Menghindari Ketergantungan pada Pinjaman Online	51
4.3.5 Kecenderungan Masyarakat Desa Hanura Lebih Memilih Pinjaman Online dibanding Koperasi.....	52
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Profil Informan.....	54
Informan 1	55
Informan 2.....	55
Informan 3	56
Informan 4.....	56
Informan 5.....	56
Informan 6.....	57
Informan 7	57
Informan 8.....	57
Informan 9.....	58
Informan 10.....	58
Informan 11	58

Informan 12.....	58
Informan 13.....	59
Informan 14.....	59
Informan 15.....	59
Informan 16.....	59
Informan 17.....	60
5.2 Hasil Penelitian	60
5.2.1 Respon Masyarakat dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih	60
5.2.1.1 Respon Positif dan Mendukung Masyarakat Desa Hanura ..	61
5.2.1.2 Respon Ragu dan Hati-Hati Masyarakat Desa Hanura	63
5.2.1.3 Respon Skeptis yang Dipengaruhi oleh Pengalaman Negatif	66
5.2.1.4 Penasaran, Antusiasme, dan Informasi Simping Siur	69
5.2.1.5 Rasa Penasaran Masyarakat dan Munculnya Kontrol Sosial terhadap Perangkat Desa	70
5.2.1.6 Ada yang Optimis, Skeptis, dan Tidak Peduli.....	70
5.2.1.7 Fenomena “Ikut-Ikutan”	71
5.2.1.8 Ketimpangan Literasi Koperasi dan Dampaknya terhadap Persepsi Masyarakat.....	72
5.2.1.9 Ketergesaan Pembentukan, Salah Kaprah Dana, dan Perebutan Peluang.....	73
5.2.1.10 Pengalaman Koperasi Masa Lalu terhadap Sikap Skeptis dan Antusiasme.....	74
5.2.1.11 Munculnya Rasa Memiliki (<i>Sense of Ownership</i>) dan Kepercayaan Sosial Masyarakat	74
5.2.1.12 Kehati-hatian Sosial Masyarakat terhadap Mekanisme Koperasi	75
5.2.1.13 Keberagaman Tingkat Pemahaman dalam Sosialisasi Koperasi	76
5.2.1.14 Sosial Generasi Muda dalam Merespons Pembentukan Koperasi	76
5.3 Pembahasan.....	77
VI. KESIMPULAN & SARAN	81
6.1 Kesimpulan	81
6.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan	41
Tabel 3. Pengurusan BUMDes Hati Nurani Hanura.....	43
Tabel 4. Profil Informan.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Teoritis	29
Gambar 2. Kantor BUMDes	43
Gambar 3. Kantor KUD	43

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan merupakan proses sosial yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga melibatkan perubahan struktur sosial, nilai, norma, serta cara pandang masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks pembangunan desa, keberhasilan suatu program tidak semata-mata ditentukan oleh perencanaan teknokratis dan dukungan anggaran, melainkan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat sebagai subjek pembangunan menafsirkan, menilai, dan merespons program tersebut. Oleh karena itu, pembangunan desa pada hakikatnya adalah arena sosial yang mempertemukan kebijakan negara dengan realitas sosial masyarakat lokal hal ini dikemukakan oleh (Suryono, 2001).

Dalam dua dekade terakhir, arah pembangunan di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan pembangunan yang bersifat top-down menuju pembangunan yang lebih berorientasi pada masyarakat (*people-centered development*). Suryono (2001) menegaskan bahwa pergeseran paradigma ini menempatkan masyarakat desa bukan lagi sebagai objek pasif pembangunan, melainkan sebagai subjek sosial yang memiliki pengalaman, pengetahuan lokal, serta kemampuan untuk menilai dan merespons kebijakan yang hadir di ruang hidup mereka. Dalam kerangka ini, perhatian terhadap respon masyarakat menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan pembangunan benar-benar bekerja di tingkat lokal.

Salah satu sektor pembangunan desa yang mendapat perhatian besar adalah pembangunan ekonomi melalui penguatan kelembagaan keuangan masyarakat desa. Koperasi desa dipandang sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang mampu mendorong kemandirian ekonomi, memperluas akses keuangan, serta

memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam konteks pembangunan desa, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mencerminkan nilai gotong royong, kepercayaan, dan kebersamaan.

Koperasi Merah Putih merupakan salah satu bentuk kebijakan pembangunan ekonomi desa yang dirancang untuk memperkuat keuangan masyarakat desa secara kolektif. Penelitian Saputri dan Hardiyanto (2025) menegaskan bahwa program ini dapat diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal, meningkatkan literasi keuangan, serta mengurangi ketergantungan pada praktik ekonomi informal yang merugikan. Namun demikian, pembentukan koperasi sebagai sebuah institusi sosial tidak serta-merta diterima secara seragam oleh Masyarakat. Setiap kebijakan pembangunan selalu berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks, di mana masyarakat memiliki latar belakang pengalaman, kepentingan, serta tingkat kepercayaan yang berbeda-beda.

Dalam perspektif sosiologi, respon masyarakat terhadap kebijakan pembangunan dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap struktur dan tujuan yang ditawarkan oleh sistem sosial tertentu. Robert K. Merton (1938) menjelaskan bahwa individu dan kelompok dalam masyarakat akan merespons struktur sosial melalui berbagai bentuk adaptasi, tergantung pada kesesuaian antara tujuan yang dilembagakan secara sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Respon tersebut tidak selalu bersifat menerima atau mendukung, tetapi dapat pula berupa keraguan, penyesuaian terbatas, penarikan diri, atau bahkan penolakan. Dengan demikian, respon masyarakat merupakan hasil dari proses penafsiran sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kondisi struktural, serta dinamika interaksi sosial.

Kerangka pemikiran Merton ini relevan untuk memahami dinamika sosial dalam pembentukan lembaga ekonomi desa seperti koperasi. Ketika koperasi diposisikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama,

masyarakat akan meresponsnya secara beragam berdasarkan sejauh mana mereka memandang koperasi tersebut sebagai sarana yang realistis, adil, dan dapat dipercaya. Respon positif dapat muncul dalam bentuk dukungan dan keterlibatan aktif, sementara respon negatif dapat tercermin melalui sikap ragu, apatis, atau skeptis. Variasi respon ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak bersikap pasif terhadap pembangunan, melainkan secara aktif menilai dan merespons kebijakan yang hadir.

Kondisi tersebut tampak dalam proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Desa Hanura merupakan desa dengan karakter sosial yang heterogen, baik dari segi mata pencaharian, tingkat pendidikan, maupun pengalaman masyarakat terhadap lembaga ekonomi sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah desa bersama masyarakat menggagas pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, proses pembentukannya tidak berjalan secara linier dan bebas dari dinamika sosial.

Di lapangan, pembentukan Koperasi Merah Putih memunculkan beragam respon masyarakat. Sebagian warga menunjukkan sikap antusias dan optimis terhadap koperasi sebagai peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan memperluas akses ekonomi. Di sisi lain, sebagian masyarakat bersikap ragu dan berhati-hati, bahkan menunjukkan sikap skeptis yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu terhadap koperasi atau lembaga ekonomi yang pernah gagal, kekhawatiran terhadap transparansi pengelolaan, serta dugaan adanya kepentingan tertentu dalam pembentukan koperasi. Respon-respon ini mencerminkan proses adaptasi sosial masyarakat terhadap kebijakan pembangunan ekonomi yang baru diperkenalkan (SIPDeskel, 2025).

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga ekonomi desa sangat dipengaruhi oleh respon dan sikap masyarakat. Penelitian Ginting dkk. (2024) menunjukkan bahwa respon dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kesadaran, serta ketersediaan waktu warga. Sementara itu,

penelitian Saputri dkk. (2025) menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam pembangunan desa, namun menghadapi tantangan serius terkait kapasitas kelembagaan dan kepercayaan masyarakat.

Penelitian lain oleh Allolayuk (2025) memperlihatkan bahwa proses sosialisasi yang intensif mampu membentuk respon positif masyarakat terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih, meskipun masih terdapat kendala struktural seperti keterbatasan modal dan akses pasar. Di sisi lain, Subakti dan Partiah (2025) menyoroti peran aktor kelembagaan desa dalam proses pembentukan koperasi, sementara Ul'zikri dkk. (2025) menekankan pentingnya kepercayaan dan transparansi dalam membangun respon positif masyarakat terhadap koperasi. Adapun penelitian Maryam (2025) menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah sah secara yuridis, keberlanjutannya tetap bergantung pada respon dan keterlibatan masyarakat sebagai anggota.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih menempatkan partisipasi sebagai fokus utama analisis. Padahal, sebelum partisipasi muncul, terdapat proses sosial yang lebih mendasar, yaitu bagaimana masyarakat merespons kebijakan pembangunan tersebut. Respon masyarakat mencakup sikap, persepsi, dan penilaian awal yang akan menentukan apakah masyarakat akan menerima, menyesuaikan diri, atau justru menjauh dari program pembangunan. Dalam konteks ini, respon masyarakat menjadi pintu masuk yang penting untuk memahami dinamika sosial pembangunan desa secara lebih utuh.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam respon masyarakat terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura. Dengan menggunakan perspektif teori adaptasi sosial Merton (1938), penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat menafsirkan tujuan dan sarana yang ditawarkan oleh koperasi, serta bagaimana respon tersebut membentuk dinamika sosial pada tahap awal pembentukan koperasi. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dipilih untuk menggali pengalaman subjektif, makna sosial, serta interaksi yang melatarbelakangi respon masyarakat tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai respon masyarakat dalam pembangunan keuangan desa, khususnya dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Selain memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan sosiologi pembangunan, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi kritis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih peka terhadap realitas sosial dan respon masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada **“Respon Masyarakat di Desa Hanura Lampung dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih”**, dengan menggunakan perspektif sosiologi pembangunan keuangan masyarakat desa.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana respon masyarakat Desa Hanura terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih serta bagaimana masyarakat menstrukturkan pemahaman mereka mengenai program Koperasi Merah Putih pada tahap awal pembentukannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji bentuk respon masyarakat Desa Hanura terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih serta menganalisis proses masyarakat dalam menstrukturkan pemahaman mereka pada tahap awal pembentukan Koperasi Merah Putih dalam konteks pembangunan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi pembangunan, khususnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap

pengembangan teori partisipasi sebagaimana dikemukakan oleh (Soekanto, 1983).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Hanura dalam merancang strategi pemberdayaan masyarakat, bagi pengurus koperasi sebagai bahan evaluasi pengelolaan partisipasi anggota, serta bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keterlibatan aktif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Koperasi Merah Putih

1. Pengertian Koperasi Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan strategis pemerintah yang dicanangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Program ini menargetkan terbentuknya koperasi di setiap desa dan kelurahan di Indonesia dengan orientasi pada prinsip gotong royong, solidaritas, dan nasionalisme ekonomi. Penamaan “Merah Putih” tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengandung pesan ideologis tentang kemandirian ekonomi rakyat yang berakar pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Sunartono, 2025).

Secara konseptual, Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai wadah kolektif masyarakat desa untuk mengelola potensi sumber daya lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi. Hasyim (2025) menjelaskan bahwa koperasi ini memiliki fungsi strategis, antara lain menyediakan akses ekonomi yang lebih inklusif melalui layanan simpan pinjam dan usaha produktif bersama, menciptakan lapangan kerja berbasis potensi lokal, serta memperkuat kelembagaan ekonomi desa sebagai penopang pembangunan jangka panjang. Dengan fungsi tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya berperan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang membentuk pola hubungan baru dalam kehidupan masyarakat desa.

Koperasi Merah Putih juga dinilai memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan klasik ekonomi pedesaan. Dirgantara dan Carina (2025) menyebutkan bahwa koperasi dapat memperpendek rantai distribusi hasil pertanian, mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, serta memperluas inklusi keuangan masyarakat desa. Dalam konteks ini, koperasi menjadi instrumen pembangunan sosial yang mendorong peningkatan literasi keuangan, memperkuat solidaritas sosial, dan menumbuhkan budaya kerja kolektif. Namun demikian, keberhasilan koperasi sebagai instrumen pembangunan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, melainkan oleh bagaimana masyarakat desa menafsirkan dan merespons keberadaan koperasi tersebut.

Dari sisi tata kelola, koperasi Merah Putih diharapkan mengadopsi prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keterbukaan terhadap masyarakat (Tampubolon et al., 2023). Prinsip-prinsip ini diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi bersama. Akan tetapi, dalam praktiknya, idealisasi tersebut sering kali berhadapan dengan realitas sosial desa yang kompleks. Penelitian Saputri dan Hardiyan (2025) menunjukkan bahwa koperasi Merah Putih masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas manajerial pengurus, potensi tumpang tindih regulasi dengan BUMDes, serta tingginya ketergantungan pada intervensi pemerintah pusat. Kondisi ini berpotensi memengaruhi cara pandang dan respon masyarakat terhadap koperasi, khususnya terkait tingkat kepercayaan dan rasa memiliki.

Selain kendala kelembagaan, tantangan pada tahap awal pembentukan koperasi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan kultural masyarakat desa. Allolayuk (2025) menemukan bahwa rendahnya literasi perkoperasian dan keterbatasan modal awal sering menjadi faktor yang memengaruhi sikap masyarakat terhadap koperasi. Meskipun kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, hal tersebut tidak secara otomatis menghasilkan respon yang positif dan konsisten. Sebagian masyarakat tetap

bersikap ragu, berhati-hati, atau memilih untuk tidak terlibat karena pengalaman masa lalu, ketidakpastian manfaat, maupun kekhawatiran terhadap pengelolaan koperasi.

Dalam perspektif sosiologi, variasi sikap tersebut dapat dipahami sebagai bentuk respon sosial masyarakat terhadap struktur dan tujuan yang dilembagakan melalui kebijakan koperasi. Robert K. Merton (1938) menjelaskan bahwa individu dan kelompok akan merespons struktur sosial melalui berbagai bentuk adaptasi, tergantung pada sejauh mana tujuan yang ditawarkan dianggap sejalan dengan sarana yang tersedia dan dapat diakses. Dalam konteks Koperasi Merah Putih, respon masyarakat dapat muncul dalam bentuk penerimaan dan dukungan, penyesuaian terbatas, sikap ragu, hingga penolakan. Respon-respon ini mencerminkan proses penilaian sosial masyarakat terhadap koperasi sebagai sarana pencapaian kesejahteraan bersama.

Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi arena ekonomi, tetapi juga arena sosial tempat berlangsungnya dinamika kekuasaan, kepercayaan, dan interaksi antar kelompok masyarakat desa. Keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh bagaimana respon masyarakat terbentuk sejak tahap awal pembentukannya. Apabila koperasi dipersepsikan sebagai lembaga yang inklusif, transparan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka respon positif cenderung muncul. Sebaliknya, apabila koperasi dipahami sebagai program administratif atau simbolik semata, respon masyarakat dapat bersifat pasif atau bahkan negatif.

Dalam konteks penelitian ini, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, menjadi studi kasus yang menarik untuk memahami dinamika tersebut. Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura memperlihatkan adanya variasi respon masyarakat, mulai dari antusiasme, sikap ragu, hingga ketidakpedulian. Variasi respon ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi desa tidak diterima secara seragam, melainkan ditafsirkan secara berbeda oleh masyarakat

berdasarkan pengalaman sosial, posisi ekonomi, dan relasi kekuasaan lokal. Oleh karena itu, analisis terhadap respon masyarakat di Desa Hanura menjadi penting untuk menilai sejauh mana Koperasi Merah Putih mampu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, atau justru berpotensi berhenti pada tataran formalitas kebijakan.

2.1.2 Pembangunan Masyarakat Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan bangsa karena desa merupakan basis kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Menurut Suryono (2001), pembangunan adalah usaha sadar yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki keadaan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dengan demikian, pembangunan desa dapat dipahami sebagai upaya terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

Landasan hukum pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 78 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan penguatan kapasitas masyarakat desa.

Sudirwo (1981) menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan proses perubahan yang berkelanjutan, yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pandangan ini menegaskan bahwa masyarakat desa seharusnya tidak diposisikan semata-mata sebagai penerima

manfaat pembangunan, melainkan sebagai subjek sosial yang memiliki pandangan, pengalaman, dan penilaian terhadap program pembangunan yang dijalankan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Kansil (1985) yang menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya menyeluruh yang melibatkan berbagai sektor dan harus dilakukan secara terpadu.

Namun demikian, dalam praktiknya, pembangunan desa sering menghadapi berbagai persoalan sosial. Conyers (1991) menjelaskan bahwa salah satu penyebab kurang optimalnya pembangunan adalah lemahnya keterhubungan antara program yang dirancang pemerintah dengan kebutuhan serta kondisi sosial masyarakat. Banyak program pembangunan desa yang dirancang secara top-down, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas lokal. Kondisi ini memunculkan berbagai respon masyarakat, mulai dari sikap menerima, ragu, hingga tidak peduli terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Ketika masyarakat merasa program tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, maka respon yang muncul cenderung bersifat pasif atau bahkan penolakan terselubung.

Dalam perspektif sosiologi pembangunan, pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan proses perubahan sosial dan budaya. Tjokrowinoto (1993) menegaskan bahwa pembangunan selalu membawa perubahan dalam nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa seharusnya mampu memperkuat solidaritas sosial, gotong royong, serta kelembagaan lokal. Tanpa dukungan sosial dan budaya yang kuat, pembangunan fisik dan ekonomi berisiko tidak berkelanjutan dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat desa.

Selain itu, pembangunan desa juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Desa menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk mengembangkan kemandirian melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya. Dalam konteks ini,

pembangunan desa seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses sosial yang membentuk sikap dan respon masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri.

Walaupun secara normatif konsep pembangunan desa telah dirumuskan dengan baik, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sering membuat pembangunan bersifat administratif dan prosedural. Selain itu, kapasitas kelembagaan desa, seperti BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya, masih terbatas dari sisi manajerial dan pengawasan. Faktor politik lokal juga kerap memengaruhi arah pembangunan desa, sehingga kebijakan yang diambil tidak selalu mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas. Kondisi ini berpengaruh terhadap cara masyarakat menilai dan merespons program pembangunan yang dijalankan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan proses sosial yang kompleks dan dinamis. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memaknai, menerima, atau merespons program pembangunan tersebut. Respon masyarakat menjadi indikator penting untuk melihat apakah pembangunan desa benar-benar berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat atau sekadar menjalankan agenda kebijakan dari atas.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pembangunan desa menjadi konteks penting untuk memahami pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi desa. Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat desa. Oleh karena itu, analisis terhadap respon masyarakat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura menjadi relevan untuk melihat bagaimana kebijakan pembangunan desa diterjemahkan dalam praktik sosial. Dengan menggunakan perspektif teori adaptasi sosial Robert K. Merton (1938), respon masyarakat

terhadap koperasi dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian masyarakat terhadap tujuan dan sarana pembangunan yang ditawarkan, baik dalam bentuk penerimaan, keraguan, maupun sikap penolakan. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika sosial pembangunan keuangan masyarakat desa.

2.1.3 Koperasi Merah Putih dan Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan proses sosial yang tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan nilai, struktur sosial, serta pola hubungan sosial di tingkat lokal. Setiap kebijakan pembangunan yang diterapkan di desa akan selalu berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga memunculkan respon yang beragam. Dengan demikian, pembangunan desa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses teknis dan administratif, melainkan sebagai proses sosial yang melibatkan cara masyarakat menafsirkan, menilai, dan merespons kebijakan yang hadir dalam kehidupan mereka.

Dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat, warga desa tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek sosial yang memiliki kemampuan untuk memberikan respon terhadap program pembangunan. Cohen dan Uphoff (1977) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada pemahaman, pengalaman, dan kepentingan sosial yang dimiliki masyarakat. Dalam penelitian ini, keterlibatan tersebut dipahami sebagai respon sosial masyarakat, bukan semata-mata sebagai partisipasi normatif yang diharapkan oleh perancang kebijakan.

Koperasi Merah Putih di Desa Hanura merupakan salah satu instrumen pembangunan desa yang dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui kelembagaan kolektif. Koperasi ini diharapkan menjadi wadah pengelolaan potensi ekonomi lokal sekaligus sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebagai kebijakan yang bersifat baru, pembentukan koperasi tidak serta-merta diterima secara seragam oleh seluruh

lapisan masyarakat. Masyarakat memberikan respon yang beragam, mulai dari dukungan, sikap menunggu, kehati-hatian, hingga keraguan terhadap keberadaan koperasi tersebut.

Perbedaan respon masyarakat terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih dapat dipahami melalui perspektif sosiologi pembangunan. Arnstein (1969) menunjukkan bahwa masyarakat dapat menampilkan sikap yang berbeda-beda terhadap program pembangunan, tergantung pada sejauh mana mereka merasa memiliki posisi dan kejelasan peran dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini, kerangka Arnstein digunakan bukan untuk mengukur tingkat partisipasi, melainkan untuk membantu membaca variasi respon masyarakat, baik yang bersifat menerima, pasif, maupun kritis terhadap pembentukan koperasi.

Secara teoritik, variasi respon tersebut sejalan dengan pemikiran Robert K. Merton mengenai respon atau adaptasi sosial masyarakat terhadap struktur dan tujuan yang dilembagakan. Merton (1957) menjelaskan bahwa individu dan kelompok dalam masyarakat akan merespons tujuan sosial dan sarana yang disediakan melalui berbagai bentuk adaptasi. Respon tersebut muncul dari penilaian masyarakat terhadap kesesuaian antara tujuan kebijakan—dalam hal ini peningkatan kesejahteraan melalui koperasi—dengan cara atau mekanisme yang digunakan untuk mencapainya. Dengan demikian, respon masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih tidak hanya berkaitan dengan tujuan ekonomi yang ditawarkan, tetapi juga dengan proses pembentukan, aktor yang terlibat, serta pengalaman sosial masyarakat sebelumnya.

Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, memiliki karakter sosial yang heterogen, baik dari segi mata pencaharian, tingkat pendidikan, maupun pengalaman masyarakat terhadap program pembangunan desa. Kondisi tersebut memengaruhi cara masyarakat menafsirkan pembentukan Koperasi Merah Putih. Sebagian masyarakat merespons secara positif dan melihat koperasi sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi desa, sementara sebagian lainnya menunjukkan respon

ragu dan skeptis karena pengalaman masa lalu terhadap koperasi atau lembaga ekonomi desa yang tidak berjalan optimal.

Conyers (1984) menegaskan bahwa respon masyarakat terhadap kebijakan pembangunan sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap relevansi program dengan kebutuhan nyata masyarakat serta tingkat kepercayaan terhadap aktor pengelola kebijakan. Apabila kebijakan dipersepsikan tidak transparan atau terlalu didominasi oleh kelompok tertentu, maka respon masyarakat cenderung melemah, meskipun tujuan kebijakan tersebut dianggap baik. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi kekuasaan, kepercayaan, dan komunikasi di tingkat lokal.

Pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura memperlihatkan dinamika respon masyarakat yang berkembang secara bertahap. Pada tahap awal, respon masyarakat belum sepenuhnya stabil dan masih berada dalam proses penyesuaian. Sebagian warga menunjukkan antusiasme, sebagian memilih bersikap menunggu, dan sebagian lainnya memperlihatkan kehati-hatian. Dalam kerangka teori Merton, variasi respon ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial masyarakat terhadap tujuan dan sarana pembangunan yang ditawarkan melalui koperasi.

Penelitian-penelitian terdahulu turut menunjukkan pentingnya kajian respon masyarakat dalam pembentukan kelembagaan ekonomi desa. Gunanta Ginting dkk. (2024) menemukan bahwa sikap dan respon masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan pengalaman sosial warga. Saputri dkk. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan dan tata kelola, tetapi juga oleh respon serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Sementara itu, Allolayuk (2025) menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi tidak selalu diikuti oleh respon aktif dalam pengelolaan koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura merupakan arena sosial yang memunculkan berbagai respon masyarakat. Respon-respon tersebut

mencerminkan proses adaptasi sosial masyarakat terhadap kebijakan pembangunan desa yang dihadirkan melalui koperasi. Oleh karena itu, memahami respon masyarakat menjadi kunci untuk menilai sejauh mana koperasi dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada respon masyarakat Desa Hanura terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih dengan menggunakan perspektif sosiologi pembangunan dan teori respon sosial Robert K. Merton. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana masyarakat menafsirkan, menerima, atau merespons pembentukan koperasi, serta bagaimana respon tersebut membentuk dinamika sosial pada tahap awal pembangunan kelembagaan ekonomi desa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Respon Sosial Robert K. Merton

Robert K. Merton (1957) dalam karyanya *Social Theory and Social Structure* memperkenalkan konsep respon sosial sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap tujuan dan sarana yang dilembagakan dalam suatu sistem sosial. Teori ini menekankan bahwa respon masyarakat bersifat spektrum dan tidak tunggal, tergantung pada bagaimana individu atau kelompok menafsirkan tujuan kebijakan serta cara atau sarana yang disediakan untuk mencapainya. Dengan demikian, respon masyarakat dipahami sebagai adaptasi terhadap kebijakan pembangunan, bukan sekadar keterlibatan normatif.

Merton mengklasifikasikan respon masyarakat menjadi lima bentuk utama. Pertama, *Conformity* (kesesuaian), yaitu masyarakat menerima tujuan dan sarana secara utuh dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan. Respon ini mencerminkan dukungan penuh terhadap program. Kedua, *Innovation* (inovasi), yaitu masyarakat menerima tujuan pembangunan, tetapi menggunakan cara-cara alternatif atau kreatif untuk mencapainya, yang tidak selalu sesuai mekanisme resmi. Ketiga, *Ritualism* (ritualisme), yaitu masyarakat mengikuti aturan atau sarana yang ada, tetapi tujuan utama

program tidak lagi menjadi fokus; misalnya, hadir secara administratif tanpa memperhatikan pencapaian tujuan koperasi. Keempat, *Retreatism* (penarikan diri), yaitu masyarakat menolak tujuan dan sarana, sehingga menarik diri dari program atau lembaga yang ada, contohnya warga yang tidak terlibat sama sekali karena ketidakpercayaan atau pengalaman negatif sebelumnya. Kelima, *Rebellion* (perlawanan), yaitu masyarakat menolak tujuan dan sarana yang ada dan berupaya menggantinya dengan tujuan atau mekanisme baru, misalnya melalui kritik terbuka atau pengusulan mekanisme alternatif.

Kelima bentuk respon ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis spektrum adaptasi sosial masyarakat secara sistematis, sehingga dapat menangkap variasi sikap masyarakat terhadap kebijakan pembangunan desa. Dalam konteks Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Koperasi Merah Putih merupakan lembaga ekonomi desa yang diharapkan menjadi wadah pengelolaan potensi ekonomi lokal dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Secara praktis, teori ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara tujuan koperasi dan persepsi masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan, serta menggali makna sosial di balik respon warga. Secara metodologis, teori Merton sangat sesuai dengan pendekatan kualitatif studi kasus, karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman subjektif, interaksi sosial, dan konteks lokal masyarakat. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka analisis yang memadai untuk memahami spektrum respon sosial masyarakat yang muncul pada tahap awal pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura, sekaligus menilai sejauh mana koperasi dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa yang efektif.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai referensi oleh peneliti untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini, serta memperkaya landasan teori dalam kajian yang dilakukan. Temuan dari penelitian sebelumnya memiliki keselarasan dengan

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, seperti yang terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Gunanta Ginting dkk. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh dan Tantangan	Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, dengan wawancara salah satu warga Desa Kandui dan pengamatan langsung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Kandui dalam perencanaan pembangunan desa sudah terlaksana dengan baik setiap tahunnya. Namun, terdapat kendala yang memengaruhi partisipasi, seperti tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat.	Persamaan: Sama-sama meneliti partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan desa. Keduanya juga menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Perbedaan: terletak pada fokus isu, jurnal ini berfokus pada partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa secara umum, sedangkan penelitian saya menyoroti respon dalam pembentukan koperasi.
2.	Anjania Rayi Saputri dkk. (2025). "Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pengurus koperasi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat, menyediakan akses ekonomi, dan	Persamaan: Sama-sama mengkaji Koperasi Merah Putih dan mengakui bahwa, partisipasi aktif masyarakat sangat krusial untuk keberhasilan

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	nan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan"	tujuannya untuk mengkaji kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dari Perspektif pembangunan desa dan desain tata kelolanya.	meningkatkan kesejahteraan desa. Namun, koperasi ini menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas manajerial, potensi tumpang tindih regulasi dengan BUMDes, dan risiko ketergantungan pada intervensi pemerintah pusat.	koperasi. Perbedaan: jurnal ini lebih fokus pada perspektif kebijakan dan tata kelola pemerintahan dengan data yang sebagian besar didapatkan dari studi pustaka.
3.	Theo Allolayuk (2025). "Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Waena, Distrik Hiram, Kota Jayapura"	Penelitian ini merupakan program pengabdian masyarakat, menggunakan pendekatan partisipatif dan deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi survei kuantitatif dan dialog kualitatif berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA) sebanyak 100 responden, terdiri dari pelaku usaha mikro, tokoh masyarakat, dan kader koperasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan literasi koperasi dari 28% menjadi 82%. Selain itu, struktur kepengurusan sementara terbentuk secara demokratis, dan 70% anggota menyatakan lebih percaya diri dalam mengelola usaha mereka. Namun, masih ada tantangan terkait modal awal dan akses pasar.	Persamaan: Keduanya sama-sama meneliti proses pembentukan Koperasi Merah Putih dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaan: jurnal ini merupakan laporan pengabdian masyarakat yang menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif.
4.	Try Subakti &	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan	Persamaan: Keduanya sama-

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Siti Partiah (2025). "Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih Studi di Desa Pademawu Barat"	jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan sosiologis. Untuk mendapatkan data, penulis harus datang secara langsung ke lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan dan wawancara semi-terstruktur.	bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam pembentukan koperasi desa. BPD bertugas menyelenggarakan musyawarah desa sebagai tahapan awal pembentukan koperasi.	sama menggunakan pendekatan sosiologis dan fokus pada proses pembentukan koperasi. Perbedaan: pada jurnal ini secara spesifik berfokus pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5.	Ahmad Robi Ul'zikri dkk. (2025). "Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih Melalui Pengabdian Berbasis Penelitian (<i>Community-Based Participatory Research</i>) di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan	Penelitian kualitatif dengan pendekatan Community-Based Participatory Research (CBPR). Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, diskusi kelompok terfokus (FGD), catatan reflektif, dan dokumentasi kegiatan workshop. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk memetakan tema partisipasi, kelembagaan,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih dapat dicapai melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pengurus, anggota, masyarakat, dan pemerintah kelurahan. Temuan utama meliputi meningkatnya pemahaman anggota terhadap prinsip koperasi, menguatnya partisipasi masyarakat dalam	Persamaan: Sama-sama mengkaji Koperasi Merah Putih dan menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses pembentukan dan penguatan koperasi. Kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami respon, partisipasi, dan dinamika sosial masyarakat desa. Perbedaan: Penelitian Ahmad Robi Ul'zikri dkk. berfokus pada proses

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Raya, Kota Palangka Raya”	akses permodalan, dan kepercayaan masyarakat.	pengelolaan koperasi, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemimpinan koperasi, transparansi pengelolaan, dan dukungan pemerintah lokal menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penguatan koperasi.	penguatan kelembagaan koperasi melalui program pengabdian berbasis CBPR di tingkat kelurahan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada respon masyarakat terhadap proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura, Lampung, tanpa intervensi program pengabdian, melainkan menggali persepsi, sikap, dan partisipasi masyarakat secara alami.
6.	Rika Maryam (2025) “Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian”	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang bertujuan untuk mengkaji norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur pendirian koperasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih secara yuridis merupakan badan hukum yang sah, sepanjang pendiriannya memenuhi persyaratan formal dan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Persamaan: Sama-sama mengkaji Koperasi Desa Merah Putih sebagai lembaga ekonomi desa dan memandang koperasi sebagai sarana untuk memperkuat ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa. Keduanya juga menempatkan koperasi sebagai

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>undangan (statute approach) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 beserta peraturan turunannya, serta pendekatan analitis (analytical approach) untuk menganalisis konsep badan hukum koperasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, doktrin, dan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Desa Merah Putih.</p>	<p>undangan. Status badan hukum tersebut memberikan legitimasi hukum, perlindungan hukum, serta pemisahan kekayaan koperasi dari kekayaan pribadi anggotanya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa koperasi desa memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen ekonomi kerakyatan dalam pembangunan desa. Namun demikian, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh aspek legal formal, tetapi juga memerlukan pembinaan, pengawasan, dan partisipasi aktif dari anggota serta dukungan pemerintah agar koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.</p>	<p>bagian dari kebijakan pembangunan desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Perbedaan: Jurnal ini menitikberatkan pada aspek hukum dan legalitas pendirian koperasi, dengan fokus pada pemenuhan syarat badan hukum menurut peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian saya lebih menyoroti respon, persepsi, dan partisipasi masyarakat desa terhadap pembentukan dan pelaksanaan Koperasi Merah Putih, serta bagaimana kebijakan tersebut dimaknai dan dijalankan dalam praktik sosial di tingkat desa.</p>

Pada penelitian Gunanta Ginting dkk., (2024), fokus kajian terletak pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa secara umum, seperti kehadiran dalam musyawarah, penyampaian usulan program, serta hambatan yang menghambat partisipasi. Sementara itu, penelitian ini berfokus secara lebih spesifik pada respon masyarakat terhadap proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura, yang mencakup sikap, motivasi, hambatan, dan makna sosial di balik penerimaan atau penolakan koperasi tersebut. Dari sisi tema analisis, penelitian Ginting dkk. menyoroti faktor-faktor seperti pendidikan, kesadaran, dan waktu, sedangkan penelitian ini menekankan aspek sosiologi pembangunan, meliputi relasi kuasa lokal, modal sosial, persepsi manfaat ekonomi dan non-ekonomi, serta dinamika kolektif dalam pembentukan koperasi. Secara metodologis, penelitian Ginting dkk. hanya menggunakan wawancara satu warga dan observasi, sementara penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan melibatkan perangkat desa, pengurus koperasi, tokoh masyarakat, anggota, dan masyarakat umum untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam. Perbedaan konteks geografis juga penting, karena Desa Kandui dan Desa Hanura memiliki karakter sosial dan struktur pembangunan yang berbeda, sehingga penelitian ini berperan mengisi celah empiris kontekstual di Lampung. Selain itu, penelitian ini menerapkan triangulasi data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) berdasarkan panduan Creswell (2014) untuk memastikan validitas yang lebih kuat dibanding penelitian sebelumnya.

Sementara itu, penelitian Anjanía Rayi Saputri dkk., (2025) lebih menitikberatkan pada perspektif kebijakan dan tata kelola pemerintahan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Kajian tersebut bersifat makro dengan analisis terhadap regulasi, desain tata kelola, dan implikasi kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal, serta menggunakan pendekatan studi pustaka dan wawancara dengan pengurus koperasi. Sebaliknya, penelitian ini bersifat sosiologis mikro, menelaah bagaimana masyarakat lokal memaknai dan merespons pembentukan koperasi melalui sikap, nilai, dan praktik sosial di tingkat komunitas. Jika Saputri dkk. menyoroti isu kelembagaan seperti tumpang tindih regulasi dan keterbatasan kapasitas manajerial, penelitian ini

lebih berfokus pada reaksi sosial masyarakat, termasuk tingkat kepercayaan, ekspektasi ekonomi, dan partisipasi warga. Kontribusi penelitian ini bersifat empiris, yakni memberikan bukti nyata mengenai respon sosial masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi sosialisasi dan intervensi pembangunan yang lebih partisipatif dan sensitif terhadap konteks lokal.

Berbeda dengan itu, Allolayuk (2025) melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tujuan aplikatif, menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dan pendekatan gabungan kuantitatif kualitatif melalui survei terhadap 100 responden. Fokus utamanya adalah mengukur peningkatan literasi koperasi dan hasil kegiatan sosialisasi. Sementara penelitian ini merupakan studi akademik sosiologi pembangunan yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif mendalam. Jika Theo menitikberatkan pada hasil intervensi dan angka perubahan literasi koperasi, penelitian ini menelusuri makna sosial di balik respon masyarakat, seperti kepercayaan, patronase, serta persepsi risiko dan peluang ekonomi yang muncul selama pembentukan koperasi. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan yang belum disentuh Theo, yakni menjelaskan mengapa dan bagaimana masyarakat merespons, bukan sekadar berapa besar tingkat partisipasinya.

Selanjutnya, penelitian Subakti dan Partiah (2025) menyoroti secara khusus peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan koperasi di Desa Pademawu Barat. Fokus penelitian mereka berada pada aspek kelembagaan formal, yaitu bagaimana BPD menyelenggarakan musyawarah dan menjalankan fungsi pengawasan dalam pembentukan koperasi. Sebaliknya, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dengan meneliti respon masyarakat secara keseluruhan, meliputi perangkat desa, pengurus koperasi, tokoh agama, anggota, dan warga biasa, sehingga tidak hanya berpusat pada satu lembaga tertentu. Jika penelitian Subakti & Partiah berupaya menjelaskan peran struktural BPD, penelitian ini berusaha memahami legitimasi sosial, penerimaan masyarakat, dan dinamika interpersonal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan koperasi. Temuan penelitian ini dapat melengkapi hasil penelitian mereka dengan menyoroti

dimensi sosial dan kultural yang menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat masyarakat.

Penelitian Ul'zikri dkk. (2025) menekankan penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih melalui pendekatan partisipatif Community-Based Participatory Research (CBPR) dalam konteks pengabdian masyarakat. Berbeda dengan itu, penelitian ini berfokus pada respon sosial masyarakat terhadap proses pembentukan koperasi di Desa Hanura tanpa intervensi program, dengan menggali sikap, persepsi, dan partisipasi masyarakat secara alami. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian Ul'zikri dkk. dengan perspektif empiris mengenai dinamika sosial pada tahap awal pembentukan koperasi desa.

Penelitian Maryam (2025) berfokus pada aspek yuridis pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dengan menelaah kesesuaiannya terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kajian tersebut menitikberatkan pada legalitas koperasi sebagai badan hukum dan pemenuhan syarat formal pendirian koperasi. Berbeda dengan itu, penelitian ini menyoroti respon sosial masyarakat Desa Hanura terhadap proses pembentukan koperasi, meliputi sikap, persepsi, motivasi, serta hambatan sosial yang memengaruhi penerimaan atau penolakan koperasi. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian Maryam dengan menghadirkan perspektif empiris mengenai bagaimana kebijakan koperasi dimaknai dan dijalankan dalam konteks sosial masyarakat desa.

Secara keseluruhan, penelitian ini berbeda dari ketujuh penelitian terdahulu dalam hal tingkat analisis, metode, konteks lokal, dan kontribusi ilmiah. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek kelembagaan, kebijakan, penguatan organisasi, atau evaluasi program koperasi yang bersifat makro, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji respon masyarakat terhadap proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura. Fokus penelitian diarahkan pada sikap, persepsi, partisipasi, serta

makna sosial yang dibangun masyarakat dalam merespons pembentukan koperasi tersebut.

2.4 Kerangka Berfikir

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menentukan arah dan keberhasilan program pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup pembangunan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan atau program yang dirancang oleh pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat merespon program tersebut. Respon masyarakat menjadi faktor penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung terlibat dan merasakan dampak dari kebijakan atau program pembangunan yang dilaksanakan.

Respon masyarakat terhadap suatu kebijakan dapat terlihat dari bagaimana masyarakat menafsirkan, menerima, menyesuaikan, ataupun menolak kebijakan yang diterapkan. Bentuk respon tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program pembangunan. Apabila masyarakat memberikan respon yang positif dan menunjukkan dukungan terhadap program yang dijalankan, maka program tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dan berkelanjutan. Sebaliknya, apabila masyarakat menunjukkan sikap kurang mendukung atau tidak terlibat dalam pelaksanaan program, maka program tersebut dapat mengalami berbagai hambatan dalam implementasinya. Dalam konteks Desa Hanura, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan salah satu bentuk upaya pembangunan desa yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Koperasi ini dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara bersama-sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui koperasi, masyarakat diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan kerja sama

antar anggota, serta menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

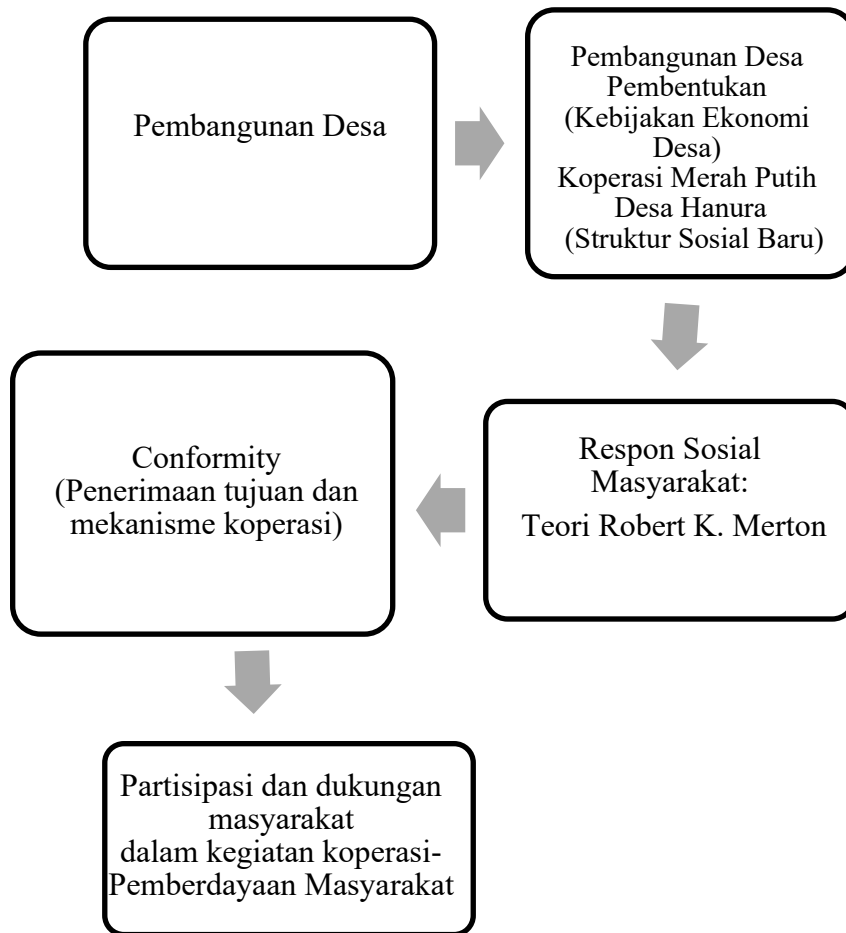
Namun demikian, keberhasilan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah desa atau pengurus koperasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh respon sosial masyarakat terhadap keberadaan koperasi tersebut. Respon masyarakat dapat dilihat dari sikap penerimaan, dukungan, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan koperasi, seperti mengikuti kegiatan sosialisasi, menghadiri musyawarah, serta berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi.

Untuk memahami respon masyarakat terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura, penelitian ini menggunakan teori respon sosial yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Menurut Merton (1957), respon masyarakat terhadap tujuan dan sarana yang dilembagakan dalam suatu sistem sosial dapat diklasifikasikan ke dalam lima bentuk adaptasi sosial, yaitu *Conformity*, *Innovation*, *Ritualism*, *Retreatism*, dan *Rebellion*. *Conformity* merupakan bentuk respon ketika masyarakat menerima tujuan yang ingin dicapai serta mengikuti sarana atau mekanisme yang telah ditetapkan. *Innovation* terjadi ketika masyarakat menerima tujuan yang ada, tetapi menggunakan cara-cara alternatif untuk mencapainya. *Ritualism* menggambarkan kondisi ketika masyarakat tetap mengikuti aturan atau mekanisme formal, tetapi tujuan utama program tidak lagi menjadi fokus utama. *Retreatism* terjadi ketika masyarakat menolak tujuan dan sarana yang ada sehingga memilih untuk menarik diri dari program. Sementara itu, *Rebellion* merupakan bentuk respon ketika masyarakat menolak tujuan dan sarana yang ada serta berupaya menggantinya dengan tujuan atau mekanisme baru yang dianggap lebih sesuai.

Kelima bentuk respon tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat memberikan berbagai bentuk adaptasi terhadap suatu kebijakan atau program pembangunan. Namun, dalam penelitian ini analisis difokuskan pada bentuk respon *Conformity*, yaitu kondisi ketika masyarakat menerima tujuan yang ingin dicapai serta mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam suatu program.

Dalam konteks penelitian ini, bentuk *Conformity* dapat dilihat dari sikap masyarakat Desa Hanura yang menerima tujuan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan kesediaan untuk mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi, seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, menghadiri musyawarah desa, serta memberikan dukungan terhadap keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, melalui konsep *Conformity* dari teori Robert K. Merton, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana masyarakat Desa Hanura merespon pembentukan Koperasi Merah Putih dengan menerima tujuan program serta mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk penerimaan dan keterlibatan masyarakat terhadap keberadaan koperasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.



Gambar 1. Kerangka Teoritis

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang menempatkan peneliti secara langsung dalam konteks sosial untuk memahami realitas dari perspektif partisipan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap fenomena sosial secara mendalam melalui keterlibatan langsung di lapangan. Denzin dan Lincoln (2018, dalam Raphael, 2022) menyebutkan bahwa praktik penelitian kualitatif membuat dunia sosial menjadi terlihat dan mempresentasikannya dalam berbagai bentuk, seperti catatan lapangan, wawancara, foto, rekaman, serta memo penelitian.

Penelitian kualitatif melibatkan praktik interpretatif dan naturalistik terhadap dunia sosial. Artinya, penelitian ini berupaya memahami dan menafsirkan realitas sosial berdasarkan makna yang diberikan oleh individu maupun kelompok terhadap pengalaman mereka (Denzin & Lincoln, 2018). Melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, peneliti berusaha menggali pandangan, pengalaman, serta dinamika sosial yang muncul dalam konteks penelitian. Dalam pendekatan studi kasus, praktik interpretatif tersebut diarahkan untuk memahami suatu kasus secara menyeluruh dan kontekstual.

Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada respon masyarakat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura, Lampung, sebagai satu kasus yang terikat (bounded system) dalam ruang dan waktu tertentu. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses pembentukan koperasi berlangsung, bagaimana

peran aparatur desa dan pengurus koperasi, serta bagaimana masyarakat memaknai dan merespons keberadaan koperasi tersebut dalam konteks sosial yang nyata. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti pengalaman individu, tetapi juga memperhatikan hubungan antaraktor, kebijakan desa, serta kondisi sosial dan budaya yang melingkupi proses pembentukan koperasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih karena Desa Hanura sedang merintis pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Selain itu, masyarakat Desa Hanura memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam, baik dari segi mata pencaharian, tingkat pendidikan, maupun pengalaman dalam program pembangunan desa.

Kondisi tersebut menjadikan Desa Hanura relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji respon dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan koperasi. Keberagaman latar belakang masyarakat memungkinkan munculnya berbagai bentuk pandangan, sikap, serta tingkat keterlibatan yang berbeda-beda, sehingga memberikan konteks yang kaya untuk memahami dinamika sosial yang menyertai pembangunan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Respon masyarakat Desa Hanura Lampung dalam pembentukan Koperasi Merah, memengaruhi proses pembangunan sosial dan ekonomi di desa tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk memahami pola-pola interaksi sosial, nilai-nilai, serta faktor-faktor yang mendorong atau menghambat keterlibatan masyarakat dalam koperasi sebagai bagian dari pembangunan desa.

Melalui pendekatan sosiologi pembangunan, penelitian ini tidak hanya melihat partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan formal semata, tetapi juga sebagai

proses sosial yang melibatkan interaksi, nilai, dan norma yang berkembang di masyarakat desa. Fokus ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana partisipasi tersebut dipahami, dijalankan, dan berdampak pada pembangunan koperasi serta kesejahteraan masyarakat secara nyata di Desa Hanura.

3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada pertimbangan pengalaman dan keterlibatan informan terhadap fenomena yang diteliti. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), penelitian kualitatif menempatkan peneliti secara langsung dalam konteks sosial untuk memahami realitas dari perspektif partisipan, sehingga informan dipilih dari individu atau kelompok yang memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena sosial yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang diteliti adalah respon masyarakat Desa Hanura, Lampung, dalam pembentukan Koperasi Merah Putih.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak memilih informan secara acak, melainkan memilih informan secara sengaja berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh data yang mendalam dan terpercaya. Sejalan dengan pandangan Denzin dan Lincoln (2018), penelitian kualitatif tidak menekankan pada jumlah informan, melainkan pada kedalaman informasi dan kekayaan makna yang dapat diperoleh dari partisipan penelitian.

Kriteria utama informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Desa Hanura dan memiliki pengalaman serta respon terhadap proses pembentukan Koperasi Merah Putih. Oleh karena itu, informan utama adalah masyarakat Desa Hanura yang mengikuti kegiatan sosialisasi koperasi, terlibat dalam musyawarah desa, serta merespons secara langsung pembentukan koperasi, baik dalam bentuk dukungan, partisipasi, maupun sikap ragu dan skeptis terhadap keberadaan Koperasi Merah Putih.

Selain masyarakat, peneliti juga mewawancarai aparatur desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa yang terlibat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembentukan Koperasi Merah Putih. Aparatur desa dipilih sebagai

informan karena dianggap memiliki pemahaman mengenai latar belakang, tujuan, serta proses pembentukan koperasi, sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif terkait dinamika pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Denzin dan Lincoln (2018), teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai praktik interpretatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang beragam dan mendalam mengenai fenomena sosial dari perspektif informan. Kemudian menggunakan berbagai sumber data sehingga realitas yang diteliti dapat dipahami secara utuh melalui analisis data. Dalam penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam, observasi dan dokumen.

3.5.1 Wawancara Mendalam

Peneliti melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih secara sengaja berdasarkan relevansi pengalaman, keterlibatan, dan pengetahuan mereka terhadap proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), penelitian kualitatif menekankan pemilihan partisipan yang memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti, sehingga mampu memberikan pemaknaan yang kaya dan mendalam.

Wawancara dilaksanakan secara tatap muka di wilayah Desa Hanura, terutama di kantor Koperasi Merah Putih maupun lokasi lain yang disepakati bersama informan. Peneliti menggunakan pertanyaan terbuka agar informan dapat mengungkapkan pandangan, pengalaman, serta sikap mereka secara reflektif. Pertanyaan dikembangkan secara fleksibel untuk menggali respon masyarakat dalam aspek kognitif (pemahaman), afektif (sikap dan emosi),

serta konatif (tindakan dan partisipasi), sesuai dengan pendekatan interpretatif yang ditekankan oleh Denzin dan Lincoln (2018).

Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara, alat perekam suara, dan catatan lapangan. Informan penelitian berasal dari berbagai kelompok, seperti aparatur desa, pengurus Koperasi Merah Putih, tokoh masyarakat, serta warga Desa Hanura yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan koperasi. Keberagaman informan ini memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas dan dinamika sosial yang berkembang di tingkat desa.

Penelitian ini melibatkan 17 informan yang berasal dari Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran. Pemilihan informan didasarkan pada variasi posisi sosial, latar belakang pengalaman, serta keterkaitan mereka dengan fenomena yang diteliti, bukan pada pertimbangan representasi statistik. Rentang usia informan berada pada 19-55 tahun dengan latar belakang pekerjaan yang beragam, sehingga memungkinkan diperolehnya perspektif multipel mengenai respon masyarakat terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih. Hal ini sejalan dengan pandangan Denzin dan Lincoln (2018) bahwa realitas sosial dipahami melalui keberagaman pengalaman dan sudut pandang aktor sosial.

Tabel 3.1

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1	RR	L	41	Kepala Desa Hanura
2	YA	L	40	Sekretaris Desa Hnanura
3	RK	L	25	Operator Smart Village Desa Hanura
4	S	P	32	Kaur Keuangan
5	A	L	47	Kepala Dusun B
6	T	L	55	Kadus D
7	J	L	55	Pensiunan
8	AP	L	20	Jasa antar jemput (Delivery Guy)
9	AS	L	54	Satpam
10	RA	L	25	Guru SMA
11	RP	P	23	IRT
12	SD	P	19	Mahasiswa
13	LZ	P	38	Pedagang UMKM

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
14	RS	L	25	Pedagang UMKM
15	AM	L	27	Pedagang UMKM
16	OS	P	35	Pedagang UMKM
17	NY	P	37	Pedagang UMKM

Sumber : diolah peneliti, 2025

3.5.2 Observasi

Menurut Denzin (dalam Denzin dan Lincoln, 2018), observasi merupakan salah satu teknik utama dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti memahami tindakan sosial, interaksi, serta makna yang dibangun oleh aktor sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari. Observasi dipandang sebagai proses interpretatif, di mana peneliti tidak hanya mencatat apa yang tampak di permukaan, tetapi juga menafsirkan situasi sosial secara holistik dan kontekstual.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di Desa Hanura untuk mengamati aktivitas masyarakat dalam proses pembentukan Koperasi Merah Putih. Fokus observasi mencakup pola interaksi antarwarga, dinamika partisipasi masyarakat, serta suasana musyawarah dan kegiatan koperasi yang berlangsung. Melalui observasi ini, peneliti dapat menangkap praktik sosial, relasi, serta respon masyarakat yang muncul secara alami di lapangan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari wawancara, tetapi juga dari pengamatan langsung terhadap realitas sosial masyarakat Desa Hanura.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Peneliti memanfaatkan sumber data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura, Lampung. Dokumen tersebut meliputi hasil musyawarah desa, notulen rapat, laporan kegiatan, dokumentasi sosialisasi koperasi, serta publikasi resmi desa yang diakses melalui laman resmi Desa Hanura.

Selain itu, peneliti juga menggunakan artikel dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan koperasi dan pembangunan desa sebagai bahan pendukung analisis. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data hasil wawancara dan observasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai respon masyarakat Desa Hanura terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif dan kontekstual. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), analisis data kualitatif merupakan proses memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data tidak mengikuti prosedur yang kaku, melainkan dilakukan secara reflektif, mendalam, dan berulang sesuai dengan dinamika data di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan aktif dalam menafsirkan data dengan mempertimbangkan konteks sosial serta pengalaman informan yang terlibat dalam proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura. Tujuan utama dari analisis data ini adalah untuk menggali makna respon masyarakat, baik berupa pemahaman, sikap, maupun bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih, serta memahami dinamika sosial yang berlangsung dalam proses pembentukan koperasi tersebut di tingkat desa.

1. Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menyaring, menyeleksi, dan menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), reduksi data dalam penelitian kualitatif merupakan proses interpretatif yang menekankan pada pemilihan dan pengorganisasian data berdasarkan makna yang muncul dari pengalaman sosial subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan membaca ulang hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura. Peneliti kemudian mengidentifikasi bagian-bagian data yang berhubungan dengan respon masyarakat terhadap pembentukan koperasi, baik dalam bentuk pemahaman, sikap, maupun tindakan partisipatif. Data yang tidak relevan disisihkan, sementara data yang bermakna dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti bentuk respon masyarakat, dinamika partisipasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih, guna menjawab rumusan masalah secara terarah dan mendalam.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, data yang telah terpilih kemudian disajikan dalam bentuk narasi *thick description* (deskripsi tebal) yang bertujuan memberikan uraian yang rinci dan mendalam mengenai respon dan pemaknaan masyarakat. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan proses interpretatif, di mana peneliti menyusun kembali potongan-potongan data ke dalam struktur yang lebih sistematis dan bermakna.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menampilkan kutipan hasil wawancara, temuan observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan tema-tema utama penelitian, seperti pemahaman masyarakat terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih, sikap dan respon masyarakat terhadap keberadaan koperasi, bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan koperasi, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi selama proses tersebut. Penyajian data disusun secara naratif agar pembaca dapat memahami konteks sosial dan dinamika kehidupan masyarakat Desa Hanura, Lampung, dalam pembentukan Koperasi Merah Putih secara utuh dan mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus dan tidak bersifat final sejak awal proses analisis. Menurut Denzin dan Lincoln (2018), kesimpulan dalam penelitian kualitatif dibangun melalui proses reflektif yang berlangsung sepanjang kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan konteks, makna, serta pengalaman sosial subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik dengan memadukan temuan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana masyarakat Desa Hanura, Lampung, memaknai dan merespon proses pembentukan Koperasi Merah Putih. Peneliti menafsirkan dinamika respon masyarakat, baik dalam bentuk dukungan, partisipasi, maupun sikap ragu dan skeptis, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi proses pembentukan koperasi. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu menggambarkan secara mendalam dinamika sosial yang terjadi dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Desa Hanura

4.1.1 Letak Geografis Desa Hanura

Desa Hanura merupakan salah satu desa di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Letaknya strategis karena berada di pusat kecamatan dengan jarak sekitar 60 km dari ibukota Kabupaten Pesawaran dan hanya 12 km dari ibukota Provinsi Lampung. Dengan jarak tersebut, Desa Hanura dapat ditempuh sekitar 30 menit dari Kota Bandar Lampung menggunakan kendaraan bermotor. Aksesibilitas menuju desa relatif baik karena hampir seluruh jalan desa sudah beraspal dan dapat dilalui dengan mudah (SIPDeskel, 2025).

Secara geografis, Desa Hanura berbatasan dengan Desa Hurun di sebelah utara, Teluk Lampung di sebelah timur, Desa Sidodadi di sebelah selatan, dan Desa Cilimus di sebelah barat. Luas wilayahnya mencapai 904 hektar yang terdiri atas lahan hutan seluas 14 hektar, lahan sawah 50 hektar, lahan perkebunan/pertanian 372 hektar, lahan terbangun 212 hektar, serta jalan seluas 30 hektar. Kondisi topografi desa berada pada ketinggian ± 250 mdpl dengan suhu harian rata-rata antara 20°C – 35°C . Iklim tropis dan kondisi geografis ini mendukung perkembangan sektor pertanian, perkebunan, serta potensi perikanan pesisir. Infrastruktur jalan dan letaknya yang dekat dengan kota menjadikan Hanura sebagai desa yang strategis dalam pengembangan ekonomi maupun pariwisata (SIPDeskel, 2025).

4.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Hanura pada tahun 2025 tercatat sebanyak 8.452 jiwa. Komposisi gender relatif seimbang, dengan laki-laki sekitar 50,6% dan perempuan 49,4%. Berdasarkan kelompok usia, penduduk balita (0–5 tahun) berjumlah 0,8%, anak-anak (6–17 tahun) sekitar 15,5%, dewasa muda (18–30 tahun) sebesar 20,7%, sementara sisanya 63% berusia di atas 30 tahun. Jika digabungkan, kelompok usia produktif mencakup lebih dari 80% total penduduk, yang berarti sebagian besar masyarakat masih dalam usia kerja. Kondisi demografis ini dapat menjadi modal penting bagi pembangunan desa, terutama dalam mendorong aktivitas ekonomi maupun pengembangan sumber daya manusia (SIPDeskel, 2025).

4.1.3 Kondisi Pekerjaan

Struktur pekerjaan masyarakat Desa Hanura menunjukkan corak yang beragam. Sebagian besar masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun demikian, sektor jasa, perdagangan, dan pekerjaan formal juga memberikan kontribusi besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Menariknya, kelompok terbesar justru berasal dari kalangan pelajar/mahasiswa sebanyak 2.742 orang atau sekitar 35,83%. Hal ini menggambarkan bahwa Desa Hanura memiliki sumber daya manusia usia muda yang cukup besar dan berpotensi untuk mendukung pembangunan desa ke depan. Selain itu, terdapat 1.766 orang (23,08%) yang berperan sebagai ibu rumah tangga, serta 1.018 orang (13,30%) yang tercatat belum atau tidak bekerja.

Kelompok yang bekerja di sektor produktif antara lain 537 orang (6,93%) sebagai buruh, 398 orang (5,20%) sebagai petani/pekebun, 352 orang (4,60%) sebagai karyawan swasta, dan 744 orang (9,74%) sebagai wiraswasta. Di sektor formal, terdapat 290 orang (3,79%) sebagai PNS, 153 orang (2,00%) sebagai TNI/Polri, serta 91 orang (1,19%) yang sudah pensiun. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pendidikan dan rumah tangga

mendominasi, sektor pertanian serta pekerjaan produktif lainnya tetap menjadi penopang utama struktur sosial ekonomi Desa Hanura (SIPDeskel, 2025).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Buruh	537	6,93
2.	PNS	290	3,79
3.	Petani/Pekebun	398	5,20
4.	Pedagang	53	0,69
5.	Karyawan	352	4,60
6.	Wiraswasta	744	9,74
7.	TNI/POLRI	153	1,90
8.	Pensiunan	91	1,19
9.	Pelajar/Mahasiswa	2.742	35,83
10.	Mengurus Rumah Tangga	1.766	23,08
11.	Belum/Tidak Bekerja	1.018	13,30
Jumlah		7.144	100,00

Sumber :diolah oleh peneliti, 2025

4.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi Desa Hanura

Selain ditunjang oleh sektor pekerjaan, kondisi sosial ekonomi Desa Hanura juga diperkuat oleh keberadaan lembaga lokal. Salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berperan dalam penguatan kapasitas masyarakat. LPM memiliki fungsi utama untuk menampung aspirasi masyarakat, ikut dalam perencanaan pembangunan, serta menggerakkan partisipasi warga melalui swadaya dan gotong royong (SIPDeskel, 2025).

Selain LPM, terdapat pula BUMDes Hati Nurani yang bergerak di bidang jasa pembayaran online bekerja sama dengan pihak ketiga. BUMDes ini berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus penyedia layanan bagi masyarakat. Masyarakat Hanura juga cukup aktif dalam mengembangkan UMKM, terutama produk kerajinan seperti miniatur kapal motor, tas rajut, serta hasil pandai besi. Program UMKM ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GADIS).

Di sisi lain, pemberdayaan keluarga juga diperhatikan melalui kegiatan PKK Desa Hanura. PKK berperan dalam bidang pendidikan keluarga, kesehatan, dan ekonomi produktif rumah tangga. Untuk memperkuat basis ekonomi bersama, pemerintah desa bersama masyarakat sedang merencanakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi wadah kolektif yang menghubungkan potensi BUMDes, UMKM, dan organisasi masyarakat lainnya, sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan (SIPDeskel, 2025).

4.1.5 BUMDes Hati Nurani

4.1.5.1 Profil BUMDES Hati Nurani

Sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Desa Hanura telah mendirikan BUMDes melalui Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2015. BUMDes didirikan sebagai keajiban atas kebijakan Dana Desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta menumbuhkan perekonomian desa. BUMDes di Desa terdiri dari Unit-unit usaha masing-masing. Tugas pengelola atau pengurus BUMDes ialah melaporkan kemajuan perkembangan kepada Badan Pengawas/Komisaris dan Pemerintah Desa Hanura. BUMDes di Desa Hanura dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 24 April 2015. Tujuan dari pendirian/pembentukan BUMDes Desa Hanura meliputi:

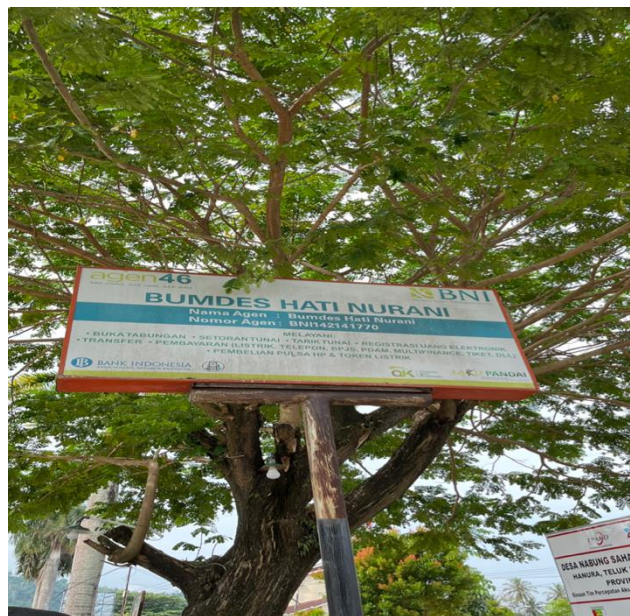
1. Meningkatkan PAD dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat di Desa Hanura.
2. Kepengurusan BUMDes Hati Nurani, Desa Hanura Provinsi Lampung. Mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat Desa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan melalui pengembangan potensi lokal desa.

Menciptakan kesempatan kerja baru (lapangan kerja) serta menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat Desa Hanura.

Tabel 3. Pengurusan BUMDes Hati Nurani Desa Hanura

No	Nama	Jabatan dalam Masyarakat	Kedudukan dalam BUMDes
1.	Rio Remota	Kepala Desa	Komisaris
2.	Zikri Septiawan	Masyarakat	Ketua
3.	Deshita	Kaur Umum Desa	Sekretaris
4.	Eka Damayanti	Masyarakat	Bendahara Koordinator Unit Usaha Pengelolaan Pasar Koordinator Unit Usaha Rumah Tangga (Produk/Jasa)
5.	Hajuli	Masyarakat	
6.	Herman	Masyarakat	

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025



Gambar 2. Kantor BUMDes



Gambar 3. Kantor KUD

4.1.5.2 Peranan Dana Desa dan Pengembangan Ekonomi BUMDes Hanura

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta memiliki wewenang dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Oleh karena itu Desa perlu memperoleh perhatian dari pemerintah pusat secara seius, karena pada hakikatnya kemajuan bangsa dan Negara berawal dari pembangunan pedesaan yang baik dan merata. Berdasarkan pasal 78, Pembangunan Desa sesuai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desaa untuk mencukupi kebutuhan dasar dan mengatasi kemiskinan, pengembangan potensi lokal, sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana dan berkelanjutan.

Seiring berjalannya waktu, Desa telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan baik bidang infrastruktur maupun non-infrastruktur. Pembangunan desa saat ini diarahkan melalui optimalisasi potensi desa. Bentuk lain dari kepedulian pemerintah pusat dalam pembangunan pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah melalui kebijakan Dana Desa. Lahirnya kebijakan Dana Desa telah mendorong pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat desa melalui kebijakan pembentukan dan pengembangan BUMDes di setiap desa. BUMDes juga hadir sebagai upaya pemerintah pusat dalam mengatasi masalah perekonomian masyarakat desa yang umumnya memiliki pendapatan rendah, dan hidup dibawah garis kemiskinan. Selain itu BUMDes didirikan sebagai upaya untuk memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes (Pasal 1 ayat 6), BUMDes adalah usaha Desa yang didirikan/dibentuk oleh pemerintah desa yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahdesa dan masyarakat serta kepemilikan modal

modalnya dimiliki sebagian besar oleh desa. Salah satu desa Kabupaten Pesawaran yang memiliki BUMDes adalah Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan nama BUMDes Hanura.

4.2 Sejarah Koperasi Indonesia

Sejarah koperasi di Indonesia berakar pada kondisi sosial ekonomi masyarakat pada masa penjajahan, ketika sebagian besar rakyat berada dalam posisi lemah dan bergantung pada sistem ekonomi kolonial yang eksploitatif. Yuskar (2006) menjelaskan bahwa Praktik rente, tengkulak, serta keterbatasan akses permodalan menjadi persoalan utama yang dihadapi masyarakat kecil. Dalam konteks tersebut, koperasi muncul sebagai bentuk usaha bersama yang bertujuan untuk melindungi dan memperkuat posisi ekonomi rakyat. Soetrisno (2003) menyatakan bahwa Cikal bakal koperasi di Indonesia dapat ditelusuri pada tahun 1896, ketika Raden Aria Wiriaatmadja mendirikan lembaga simpan pinjam bagi pegawai negeri di Purwokerto. Lembaga ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari praktik lintah darat. Inisiatif tersebut kemudian berkembang dan menjadi fondasi awal bagi gerakan koperasi di Indonesia.

Perkembangan koperasi pada masa pergerakan nasional, sebagaimana ditegaskan oleh Swasono (2002), berkaitan erat dengan perjuangan rakyat dalam membangun kemandirian ekonomi dan melawan penindasan kolonial. Koperasi tidak hanya diposisikan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen perjuangan sosial yang menanamkan nilai kebersamaan, solidaritas, dan keadilan. Dalam kerangka pemikiran tersebut, Mohammad Hatta merumuskan koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, di mana anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang demokratis dan partisipatif.

Pandangan ini diperkuat oleh Yuskar (2006) yang menyatakan bahwa koperasi menurut Hatta merupakan sarana pemberdayaan rakyat untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat kecil serta membangun kesadaran kolektif agar

kegiatan ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir pihak, melainkan dikelola secara bersama demi kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Swasono (2004) menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka, koperasi memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk usaha yang paling sesuai dengan amanat tersebut adalah koperasi. Atas pemikiran dan perannya, Mohammad Hatta kemudian dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, dan tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional.

Pada masa Orde Lama, koperasi mulai dikembangkan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun demikian, pengembangan koperasi pada periode ini masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya kemampuan manajerial koperasi. Memasuki masa Orde Baru, sebagaimana dikemukakan oleh Soetrisno (2003), pemerintah mendorong pertumbuhan koperasi secara masif melalui berbagai program pembangunan, khususnya melalui pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Meskipun secara kuantitatif jumlah koperasi mengalami peningkatan yang signifikan, sebagian besar koperasi berkembang sebagai perpanjangan program pemerintah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya inisiatif dan partisipasi masyarakat, sehingga koperasi kerap dipersepsikan sebagai “koperasi pengurus” atau “koperasi program”, bukan sebagai lembaga ekonomi yang tumbuh dari kesadaran dan kebutuhan anggota itu sendiri (Yuskar, 2006). Memasuki era reformasi dan otonomi daerah, koperasi menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan pasar bebas, globalisasi ekonomi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat akibat kasus penyalahgunaan wewenang dan lemahnya tata kelola koperasi. Stiglitz (2002) berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut, koperasi dan lembaga keuangan alternatif tetap memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat lapisan bawah yang tidak sepenuhnya terlayani oleh sistem perbankan formal. Sejalan dengan pandangan tersebut, Soetrisno (2003) menegaskan bahwa koperasi di Indonesia memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang penting sebagai penopang ekonomi rakyat, meskipun

dihadapkan pada berbagai keterbatasan struktural. Sementara itu, Yuskar (2006) mengemukakan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh dukungan kebijakan dan struktur organisasi, tetapi sangat bergantung pada tingkat partisipasi, kepercayaan, dan kesadaran anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Kondisi ini menjadi konteks penting dalam memahami respons masyarakat terhadap pembentukan koperasi di tingkat desa, termasuk Koperasi Merah Putih di Desa Hanura, Lampung.

Sejarah panjang perkembangan koperasi di Indonesia tersebut membentuk pengalaman kolektif masyarakat desa dalam memaknai koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Di tingkat desa, termasuk di Desa Hanura, koperasi tidak hadir dalam ruang yang kosong, melainkan dibingkai oleh ingatan sosial masyarakat terhadap praktik koperasi sebelumnya, khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) yang berkembang pada masa Orde Baru. Pengalaman tersebut turut memengaruhi cara masyarakat menilai, menerima, atau bahkan meragukan pembentukan koperasi baru. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya dipahami sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan, partisipasi, dan keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura perlu dipahami sebagai bagian dari kelanjutan sejarah koperasi Indonesia di tingkat lokal, yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan, pengalaman kelembagaan masa lalu, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa saat ini.

4.3 Sejarah Koperasi di Desa Hanura

Sejarah kelembagaan koperasi di Desa Hanura berawal dari keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) yang pada masa sebelumnya menjadi salah satu lembaga ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan penjelasan informan penelitian, KUD di Desa Hanura pernah berfungsi sebagai wadah pengelolaan kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan usaha dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Pada masanya, KUD dikenal oleh warga sebagai lembaga yang mengelola kegiatan ekonomi secara kolektif dan menjadi bagian dari struktur ekonomi desa. Keberadaan KUD juga ditandai

dengan tersedianya fasilitas fisik berupa bangunan kantor yang digunakan sebagai pusat operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya, aktivitas KUD di Desa Hanura secara bertahap berhenti. Informan menjelaskan bahwa berhentinya operasional KUD tidak disebabkan oleh masalah keuangan, konflik kepengurusan, maupun penurunan kepercayaan masyarakat secara drastis, melainkan lebih berkaitan dengan perubahan kebijakan dan arah pembangunan desa. Seiring diberlakukannya Undang-Undang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola potensi ekonomi lokal melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kondisi ini mendorong terjadinya penyesuaian kelembagaan, di mana peran KUD yang sebelumnya dominan mulai tergantikan oleh BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang dinilai lebih sesuai dengan regulasi dan sistem pengelolaan ekonomi desa yang baru.

Peralihan kelembagaan dari KUD ke BUMDes di Desa Hanura terlihat secara nyata melalui alih fungsi bangunan operasional. Gedung yang sebelumnya digunakan sebagai kantor KUD kemudian dimanfaatkan sebagai tempat operasional BUMDes. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan fungsi ekonomi desa, meskipun bentuk kelembagaannya mengalami perubahan. BUMDes Desa Hanura hingga saat ini masih beroperasi dan menjalankan unit usaha pengelolaan sampah warga, yang menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat desa. Unit usaha tersebut memperlihatkan bahwa BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga menjalankan kegiatan ekonomi yang bersifat operasional dan langsung berkaitan dengan pelayanan publik.

Meskipun BUMDes masih aktif, informan menjelaskan bahwa informasi mengenai sejarah pendirian, struktur kepengurusan, serta dokumen kelembagaan BUMDes belum tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketiadaan dokumentasi resmi yang dapat dijangkau publik menyebabkan sejarah kelembagaan ekonomi desa, baik KUD maupun BUMDes, lebih banyak diketahui melalui ingatan kolektif dan pengalaman warga. Kondisi ini

mencerminkan keterbatasan transparansi kelembagaan yang turut memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi desa.

Dalam konteks kehidupan ekonomi masyarakat, informan juga menjelaskan bahwa warga Desa Hanura memiliki pola akses keuangan yang beragam. Masyarakat tidak hanya mengandalkan satu lembaga keuangan tertentu, tetapi memanfaatkan berbagai sumber, mulai dari lembaga perbankan resmi, layanan keuangan semi-formal, hingga mekanisme informal berbasis kepercayaan sosial seperti arisan. Keberagaman pola akses keuangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kebutuhan ekonomi secara mandiri, sekaligus menyesuaikan diri dengan keterbatasan dan peluang yang tersedia di lingkungan desa.

Keseluruhan dinamika tersebut membentuk latar historis dan sosial yang penting dalam memahami munculnya kembali gagasan pembentukan koperasi di Desa Hanura. Pengalaman masa lalu dengan KUD, keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa saat ini, serta kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan kolektif yang lebih inklusif menjadi bagian dari proses panjang perkembangan kelembagaan ekonomi desa. Oleh karena itu, sejarah koperasi di Desa Hanura tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai rangkaian perubahan kelembagaan yang terus berkembang seiring dengan perubahan kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan dinamika pembangunan desa.

4.3.1 Revolusi Pola Utang Masyarakat Desa Hanura dari Rentenir hingga Pinjaman Online

Berdasarkan hasil wawancara, praktik berutang di Desa Hanura mengalami perubahan bertahap yang berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan desa. Pada periode awal, ketika akses terhadap lembaga keuangan formal masih sangat terbatas, masyarakat Desa Hanura umumnya memenuhi kebutuhan dana melalui relasi personal. Pinjaman dilakukan kepada kerabat, tetangga, tokoh masyarakat, maupun individu yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih, termasuk rentenir lokal. Pola ini bertumpu pada

kedekatan sosial dan kepercayaan, sehingga proses peminjaman relatif mudah dan cepat. Namun, informan menjelaskan bahwa pola tersebut sering kali menempatkan peminjam pada posisi yang lemah, karena hubungan utang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial, yang dapat menimbulkan tekanan moral, ketergantungan jangka panjang, serta relasi kuasa yang tidak seimbang.

Seiring dengan berkembangnya infrastruktur dan layanan keuangan formal, masyarakat Desa Hanura mulai mengenal lembaga perbankan sebagai sumber pembiayaan yang dianggap lebih resmi dan aman. Bank dipersepsikan mampu memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih jelas dan mekanisme yang lebih teratur dibandingkan praktik utang informal. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan. Persyaratan administratif, kebutuhan agunan, serta prosedur yang dinilai rumit dan memakan waktu membuat bank kurang responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat desa yang sering kali bersifat mendesak dan tidak terencana. Kondisi ini menyebabkan lembaga perbankan lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tertentu, sementara sebagian lainnya tetap berada di luar jangkauan layanan formal.

Memasuki era digital, perubahan pola utang masyarakat Desa Hanura semakin terlihat dengan hadirnya layanan pinjaman online. Informan menjelaskan bahwa pinjol menjadi pilihan baru karena menawarkan kemudahan akses melalui telepon genggam, proses pencairan dana yang cepat, serta minimnya persyaratan administratif. Pinjaman online umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, keperluan kesehatan, atau tambahan modal usaha kecil. Namun, di balik kemudahan tersebut, informan juga menyadari adanya risiko yang tinggi, terutama terkait bunga, denda, dan tekanan penagihan. Dengan demikian, revolusi pola utang di Desa Hanura menunjukkan pergeseran dari sistem utang berbasis relasi sosial menuju sistem digital yang impersonal, cepat, dan praktis, tetapi sekaligus menghadirkan kerentanan baru bagi masyarakat desa dalam mengelola risiko utang jangka panjang.

4.3.2 Pemikiran Mohammad Hatta tentang Koperasi dalam Konteks Praktik Utang

Mohammad Hatta memandang koperasi sebagai instrumen pembebasan ekonomi rakyat dari berbagai bentuk eksploitasi, khususnya praktik utang berbunga tinggi yang menjerat masyarakat kecil. Koperasi tidak dipahami semata sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, di mana anggota memiliki posisi ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Melalui prinsip tersebut, koperasi dirancang untuk mengubah relasi ekonomi yang timpang menjadi relasi yang lebih setara dan partisipatif.

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara di Desa Hanura, pemikiran Hatta tersebut relevan dengan pengalaman masyarakat yang kerap berada pada posisi lemah dalam praktik utang melalui rentenir maupun pinjaman online. Dalam sistem tersebut, masyarakat cenderung menjadi objek ekonomi karena tidak memiliki kendali atas mekanisme bunga, denda, maupun penagihan. Berbeda dengan praktik tersebut, koperasi menekankan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, prinsip keadilan, serta pembagian manfaat secara kolektif. Oleh karena itu, koperasi secara konseptual diposisikan sebagai alternatif sistem utang yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, serta selaras dengan nilai kebersamaan yang masih hidup dalam masyarakat Desa Hanura.

4.3.4 Koperasi Merah Putih sebagai Upaya Menghindari Ketergantungan pada Pinjaman Online

Berdasarkan hasil wawancara, gagasan pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura muncul sebagai respons atas meningkatnya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap pinjaman online dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Informan menjelaskan bahwa pinjaman online kerap dipilih karena prosesnya cepat, mudah diakses, dan tidak memerlukan jaminan, terutama ketika masyarakat menghadapi kebutuhan mendesak seperti kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, atau tambahan modal usaha. Namun demikian, informan juga mengungkapkan bahwa dampak jangka

panjang dari penggunaan pinjol sering kali memberatkan, terutama akibat tingginya bunga, denda keterlambatan, serta tekanan penagihan yang menimbulkan beban ekonomi dan psikologis bagi peminjam.

Dalam konteks tersebut, Koperasi Merah Putih dipandang sebagai upaya menghadirkan lembaga keuangan kolektif yang lebih adil, transparan, dan dekat dengan kebutuhan riil masyarakat Desa Hanura. Koperasi tidak hanya diharapkan berfungsi sebagai penyedia pembiayaan alternatif, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan pendampingan keuangan bagi masyarakat. Melalui mekanisme koperasi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih terkendali, berbasis pada kemampuan anggota, serta disertai dengan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan risiko utang. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih diposisikan sebagai alternatif yang berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sistem utang digital, sekaligus memperkuat kemandirian dan solidaritas ekonomi di tingkat desa.

4.3.5 Kecenderungan Masyarakat Desa Hanura Lebih Memilih Pinjaman Online dibanding Koperasi

Meskipun koperasi secara normatif menawarkan nilai kebersamaan, keadilan, dan keberlanjutan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Hanura dalam praktiknya masih lebih cenderung memilih pinjaman online dibandingkan koperasi. Informan menjelaskan bahwa pinjaman online dipersepsikan sebagai solusi yang cepat dan praktis, terutama ketika masyarakat menghadapi kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak. Kemudahan akses melalui telepon genggam, kecepatan pencairan dana, fleksibilitas penggunaan, serta ketiadaan kewajiban administratif yang kompleks menjadikan pinjol lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana secara segera.

Sebaliknya, koperasi masih dipersepsikan membutuhkan proses yang relatif lebih panjang, mulai dari persyaratan keanggotaan, mekanisme pengajuan pinjaman, hingga keterlibatan dalam struktur kelembagaan. Bagi sebagian

masyarakat Desa Hanura, komitmen kolektif tersebut tidak selalu sejalan dengan kebutuhan ekonomi yang bersifat individual dan mendesak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis kebersamaan dengan realitas kebutuhan ekonomi masyarakat desa yang semakin dipengaruhi oleh kecepatan dan fleksibilitas sistem keuangan digital. Oleh karena itu, tantangan utama Koperasi Merah Putih di Desa Hanura adalah bagaimana menghadirkan layanan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa menghilangkan prinsip dasar koperasi yang menekankan partisipasi, keadilan, dan solidaritas ekonomi.

VI. KESIMPULAN & SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai respon masyarakat Desa Hanura terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih, dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat menunjukkan variasi sikap yang mencerminkan perbedaan kondisi sosial ekonomi, pengalaman kolektif, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap program koperasi. Sebagian masyarakat menunjukkan respon positif dan antusias karena memandang Koperasi Merah Putih sebagai peluang baru untuk memperkuat ekonomi rumah tangga, khususnya dalam hal akses permodalan dan pengembangan usaha. Koperasi dipersepsikan sebagai alternatif lembaga keuangan desa yang lebih terjangkau dan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik hutang nonformal yang selama ini membebani kehidupan ekonomi mereka.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sebagian masyarakat yang merespon dengan sikap ragu, skeptis, atau pasif. Sikap tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan informasi mengenai koperasi, kekhawatiran terhadap risiko pengelolaan, serta pengalaman masa lalu masyarakat terhadap lembaga koperasi atau program ekonomi desa yang tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pembentukan koperasi masih berada pada tahap penyesuaian dan membutuhkan proses untuk membangun kepercayaan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat koperasi bagi masyarakat desa.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa respon masyarakat Desa Hanura tidak dapat dilepaskan dari kondisi tekanan keuangan yang telah lama dialami masyarakat desa. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal mendorong sebagian masyarakat bergantung pada rentenir, bank

keliling, pinjaman online, maupun berbagai bentuk hutang informal lainnya sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam konteks tersebut, pembentukan Koperasi Merah Putih dimaknai sebagai sarana ekonomi yang diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih aman, kolektif, dan berkelanjutan terhadap persoalan keuangan masyarakat desa.

Dalam perspektif teori Robert K. Merton, variasi respon masyarakat terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial masyarakat terhadap tekanan struktural di bidang ekonomi. Sebagian masyarakat menunjukkan bentuk respon *conformity*, yaitu menerima tujuan pembentukan koperasi serta bersedia mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam proses pembentukannya. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang menunjukkan sikap kehati-hatian atau pasif yang mencerminkan proses penyesuaian sosial sebelum sepenuhnya menerima keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi desa.

Dengan demikian, pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Hanura tidak hanya merupakan bagian dari program pembangunan ekonomi desa, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya masyarakat dalam mencari solusi terhadap persoalan keuangan yang bersifat struktural. Keberhasilan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam membangun kepercayaan masyarakat, menyediakan informasi yang jelas dan transparan, serta menunjukkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Apabila koperasi mampu dikelola secara akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, maka Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi lembaga ekonomi desa yang berkelanjutan serta berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hanura.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai respon masyarakat Desa Hanura terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi ulang mengenai tujuan dan mekanisme Koperasi Merah Putih agar masyarakat tidak lagi terjebak pada informasi simpang siur, seperti isu dana hibah miliaran atau anggapan bahwa koperasi adalah proyek politik.
2. Diperlukan penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi, terutama terkait sistem pinjaman, bunga, laporan keuangan, serta perkembangan unit usaha, sehingga keraguan masyarakat yang pernah memiliki pengalaman buruk terhadap koperasi dapat diminimalisasi.
3. Masyarakat diharapkan lebih berani terlibat dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan, serta menyampaikan pendapat terkait kebutuhan dan program koperasi agar tidak hanya menjadi penonton, melainkan bagian aktif dari pengembangan lembaga ini.
4. Pemerintah desa dan pengurus koperasi diharapkan tidak menyalahgunakan koperasi untuk kepentingan tertentu, baik yang bersifat politik maupun pribadi, serta memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip gotong royong, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
5. Generasi muda diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam koperasi, terutama melalui peningkatan keterampilan kewirausahaan, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi, sehingga koperasi dapat berkembang menjadi wadah inovasi ekonomi desa.
6. Untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian lanjutan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pelaku UMKM, nelayan, perangkat desa, serta pihak perbankan sehingga perspektif tentang dinamika pembentukan Koperasi Merah Putih menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dirgantara and J. Carina, “Koperasi Desa Merah Putih Di-Launching 28 Oktober 2025,” nasional.kompas.com, 8 Mei 2025. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/08/20360851/koperasi-desah-merah-putih-di-launching-28-oktober-2025>. (diakses 17 September 2025).
- A. Hasyim, “Prabowo Pimpin Ratas Percepatan Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Desa,” setkab.go.id, 14 Mei 2025. [Online]. Available: <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-pimpin-ratas-percepatan-koperasi-merah-putih-untuk-perkuat-ekonomi-desah>. (diakses 17 September 2025).
- Allolayuk, T. (2025). *Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura*. Celebes Journal of Community Services, 4(2), 396-404.
- Arnstein, S.R., “A Ladder of Citizen Participation”. Journal of the American Planning Association, Vol 35: 4, (1969) pp. 216 – 224.
- Cohen, J. C., & Uphoff, N. T. 1977. Rural Development Participation. Cornell: Center For International Studies, Cornell
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ke Tiga: Suatu Pengantar (Susetiawan, Penerjemah)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Denzin, N, K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh dan Tantangan*. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 112-129.
- Kansil, C.S.T. 1985. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Nasional.
- Maryam, R. (2025). *Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jurnal Penelitian Hukum Galunggung, 2(2), 17-37.
- Merton, R. K. (1957). Social structure and anomie. *Merton, R., op. cit*, 121-60.

- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya- upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Research (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Saputri, A. R., & Hardiyan, M. I. (2025). *Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan*. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95-106.
- SIPDeskel. (2025). *Profil Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran*. Diakses pada 16 September 2025, dari <https://hanura-telukpandan.metadesa.id/pages/home/home.aspx>
- Soetrisno, N. (2003). *Koperasi mewujudkan kebersamaan dan kesejahteraan menjawab tantangan global dan regionalisme baru*. *Jurnal Ekonomi Rakyat*.
- Soetrisno, N. (2003). *Rekonstruksi pemahaman koperasi merajut kekuatan ekonomi rakyat*. *Jurnal Ekonomi Rakyat*.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.
- Subakti, T., & Partiah, S. (2025). *Peran BPD (Badan Permusyawaratan Dasa) dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih Studi di Desa Pademawu*. *Collaborative: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-13.
- Sudirwo, Daeng. 1981. *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Angkasa
- Sunartono. (2025, April 19). *Ambisi Prabowo bentuk 80.000 koperasi desa merah putih*. <https://news.harianjogja.com/read/2025/04/19/500/1210432/ambisi-prabowo-bentuk-80000-koperasi-desa-merah-putih> (Diakses 17 September 2025).
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang. Universitas Negeri Malang: UM Press.
- Swasono, S.-E. (2002). *Bung Hatta: Bapak kedaulatan rakyat (Memperingati satu abad Bung Hatta)*. Yayasan Hatta.
- Swasono, S.-E. (2004). *Hatta dan ekonomi rakyat: Pandangan strukturalisme awal (Kumpulan pikiran Bung Hatta)*. FE-UBH.
- Tampubolon, A. F., Hariyoko, Y., & Soesiantoro, A. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sedati Sidoarjo:(Studi Pelaksanaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga)*. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 3(02), 27-43.

- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1993. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ul'zikri, A. R., Alam, M. D. S., Sirait, M., Masyahbandi, R., Utami, P. J., Irwan, A. I. U., ... & Bella, E. S. (2025). *Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih Melalui Pengabdian Berbasis Penelitian (Community-Based Participatory Research) di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya*. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 4(4), 1402-1416.
- Yuskar. (2006). *Bung Hatta: Ekonomi kerakyatan dan koperasi Potret masa lalu, masa kini, dan masa datang*. Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.